



0325/ED/082015

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

A

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LI CLAUDIA CHANDRA
2. Jabatan : CALON WAKIL WALIKOTA - TANGERANG SELATAN PERIODE 2015 - 2020
3. Tempat & Tanggal Lahir : DABO SINGKEP, 24 Mei 1972
4. Alamat Kantor : Jl. ---, ---
5. Tanggal Pelaporan LHKPN : 27 Juli 2015

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH & BANGUNAN)	Rp.	1.132.200.000
1. Tanah & Bangunan seluas 162 m2 & 240 m2, di Kabupaten TANGERANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 NJOP Rp.1.132.200.000		
B. HARTA BERGERAK	Rp.	629.500.000
a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA		
1. Mobil, merk HONDA CR-V, tahun pembuatan 2014, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2014 nilai jual Rp.394.000.000		
2. Mobil, merk MAZDA 2, tahun pembuatan 2014, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2014 nilai jual Rp.235.500.000		
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA		----
c. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.118.400.000
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2012 sampai dengan 2015 dengan nilai jual Rp.4.118.400.000		
C. SURAT BERTAGIH	Rp.	1.900.000.000
1. Tahun investasi dari 2013 sampai dengan 2015 yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai jual Rp.1.900.000.000		
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA	Rp.	1.173.237.366
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.84.737.366		
2. Yang berasal dari --- dengan nilai Rp.1.088.500.000		
E. PIUTANG		----
TOTAL HARTA (II)	Rp.	8.953.337.366
III. HUTANG	Rp.	1.271.052.904
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG sebesar Rp.1.271.052.904		
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)	Rp.	7.682.284.462

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
PLH. DEPUTI

GIRI SUPRAPDIONO

Jakarta, 13 Oktober 2015
DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN
PLH. DIREKTUR

ADLINSYAH M.N.

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.